

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Harva Creative, 2023.
- Ahmad Mustanir dkk, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Ctk. Pertama, Widina Media Utama, Bandung, 2023.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1997.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001.
- Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Depok, 2017.
- Hasanal Mulkan & Serlika Aprita, *Hukum Otonomi Daerah*, Edisi Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2023.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marbun, S.F Dan Moh. Mahfud, M.D., *Pokok-pokok hukum administrasi negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Naning Fatmawatie, *Otonomi Daerah Dan Pendapatan Daerah*, Ctk. Pertama, STAIN Kediri Press, Kediri, 2016.
- Ni'matul Huda & R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Petama, Nusa Media, Bandung.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- (\_\_\_\_\_), *Negara Hukum, Demokrasi, & Judicial Review*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2021.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Rossy Lambelanova, *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*, Penulisan Buku Literatur IPDN Tahun 2022.
- Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Soekanto, S, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 1988.
- Sri Soemantri M, Ketetapan MPR (S) *Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Resnadja Karya, Bandung, 1985, Hlm 11, dalam Buku Ni'matul Huda & R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung.
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015.
- Tanto Lailam, *Teori & Hukum Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

## JURNAL

- Ade Irawan Taufik, “Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Rechts Vinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, Edisi No 2 Vol.10, 2021.
- Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2017.
- Buddy Suseto, Zarina Othman, and Farizal Bin Mohd Razalli, “An Overview of Indonesia’s Maritime Strategy”, *Indonesian Journal of Geography*, Edisi No. 2 Vol. 50, Faculty of Geography UGM and The Indonesian Geographers Association, 2018, hlm. 145, doi:10.22146/ijg.27954.
- Dian Agung Wicaksono dan Faiz Rahman, “Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal*

*Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Edisi No. 2 Vol. 11, 2020, 10.22212/jnh.v11i2.1614.

Enny Nurbaningsih, “Hierarki Baru Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi No. 48 Vol. X, 2004.

Femi Asteriniah and Deby Chintia Hestiriniah, "Transforming Governance in Indonesia: Exploring New Frontiers in Public Sector Management", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, Edisi No. 2 Vol. 13, 2023, doi:10.26858/jiap.v13i2.56222.

Fendi Setyawan, “Institusionalisasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 2 Vol 18, 2021, hlm. 250.

Khopiatuziadah, “Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Naskah Akademik”, *Jurnal Rechts Vinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, 2016.

Lucky Wuwung, Alistair McIlgorm, and Michelle Voyer, “Sustainable Ocean Development Policies in Indonesia: Paving the Pathways towards a Maritime Destiny”, *Frontiers in Marine Science*, 11 (2024), doi:10.3389/fmars.2024.1401332.

Luthfi Widagdo Eddyono, “Konstitusionalitas Undang-Undang Pelayaran”, *Jurnal Rechtsvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, Edisi No. 2 Vol. 8, 2019.

Marbun, S.F Dan Moh. Mahfud, M.D., *Pokok-pokok hukum administrasi negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987, dalam Danel Aditia Situngkir, “Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum”, *Ensiklopedia Of Journal*, Edisi No. 4 Vol. 5 No.4, 2023.

Mawardi Khairi, “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil”, *Jatiswara : Fakultas Hukum Universitas Mataran*, Edisi No.3 Vol 35, 2020, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i3.262>.

MT Advisory, “The Shipping Sector The Implementing Regulations of the Omnibus Law on Job Creation”. Makarim & Taira S. Counsellors at Law, Issue 5, 2021.

Muliati, “Administrasi Pemerintahan Daerah (Wujud Pemerintahan Demokrasi Dalam Otonomi Daerah)”, *Meraja Journal*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2019.

- Proyudi, ‘Desentralisasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Politik Negara Di Tengah Hubungan Pusat.Daerah’, *Kajian Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan*, Edisi No 4 Vol. 79, 2014, 10.22212/kajian.v19i4.561.
- Wahyu Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2024.
- Wicipto Setiadi, “Mewujudkan Perencanaan Pembentukan Undang-Undang Yang Terencana, Terpadu, Dan Sistematis Kaitannya Dengan Konsep Refomarsi Regulasi”, *Makalah Disampaikan dalam Konsultasi publik Reformasi Regulasi*, BAPPENAS, 2013. Terdapat dalam M. Ilham F. Putuhena, “Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif”, *Jurnal Rechts Vinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, Edisi No. 3 Vol. 2, 2013.

### **SKRIPSI/DISERTASI**

- Latifah Syariati Pasha, “Tata Kelola Wilayah Perairan Dalam Perspektif Hukum Pemerintah Daerah Dan Teori Kedaulatan (Studi Kasus Labuh Jangkar Di Wilayah Perairan Kepulauan Riau)”, *Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023 M / 1445 H.
- Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Dalam Ikhwan Sugiono, “Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Tangerang”, *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1434 H / 2013 M.
- Umar Aris, “Politik Hukum Penataan Wewenang Sektor Kepelabuhan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia”, *Disertasi Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta*, 2013.
- Zuryat Rachmatullah, “Tinjauan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Skripsi Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2017.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang (UU) Nomor 66 Tahun 2024 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.

## DATA ELEKTRONIK

Abdul Sani, S.Pd.I, 'Otonomi Daerah Esensi, Tujuan dan Manfaatnya Bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung', 2017, terdapat dalam <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung>, diakses tanggal 12 November 2024.

Muhammad Idris, "Info Pelabuhan Ferry Penajam, Tiket, dan Jadwal Kapal", terdapat dalam <https://money.kompas.com/read/2023/06/11/045820126/info-pelabuhan-ferry-penajam-tiket-dan-jadwal-kapal>, diakses ditanggal 2 Februari 2025.

Naomy, "15 Pelabuhan di Ibukota Baru Kaltim", terdapat dalam <https://www.beritatrans.com/artikel/143452/15-Pelabuhan-di-Ibukota-Baru-Kaltim-Cek-di-Sini/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2025.

Sahat A M Siahaan, Dwi Meitiara Pratiwi Bakrie, and Ali Budiardjo, "Recent Changes in Regulations on Port Operation in Indonesia". Terdapat dalam <https://www.martindale.com/matter/asr-1902524.pdf>, diakses tanggal 8 November 2024.

Terdapat dalam <https://hutchisonports.co.th/laem-chabang-port/> diakses pada tanggal 10 Februari 2025.

USAID, Principles Of Port Operations Regulation, 2018, hlm. 22, terdapat dalam [https://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PA00THBS.pdf](https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00THBS.pdf) diakses tanggal 8 November 2024.

#### **SUMBER LAIN**

Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 52-53. Dalam Darus Altin, Nanang Wahyudin, Rahmat Robuwan, dan Muhammad Qomaruddin Ridwan, “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, *Kerjasama antara LPPM Universitas Bangka Belitung dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Bangka Tengah*, 2022, [https://jdih.magelangkab.go.id/Naskah\\_akademik/detail/18](https://jdih.magelangkab.go.id/Naskah_akademik/detail/18).

Laporan Akhir Kajian Akademik Tata Kelola Pelabuhan Pada Industri Angkutan Penyeberangan Di Indonesia, *Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2024.

Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pembagian Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional”, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.* 2015.

Suparto, “Otonomi Daerah Di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip Dan Urgensinya”, *Prosiding Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan*, Umrah Press, 2017.